

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
DIPROVINSI ACEH**



Disusun Oleh :
Angelina Salsabila
NIM. 190604007

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDAACEH
2025M/1446H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Angelina Salsabila

NIM : 190604007

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2024

Yang Menyatakan



Angelina Salsabila

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Belanja Modal di Provinsi Aceh**

Disusun Oleh:

Angelina Salsabila

NIM: 190604007

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II



Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 198307092014032002



Uliya Azra, SE., M.Si.

NIP. 199410022022032001

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 198307092014032002

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Belanja Modal di Provinsi Aceh

Angelina Salsabila
NIM. 190604007

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Senin, 30 Desember 2024 M
27 Jumadil Akhir 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002


Uliya Azra, S.E., M.Si
NIP. 199410022022032001

Penguji I,

Penguji II,


Hafizh Maulana, SP., SHI., ME.
NIP. 199001062023211015


Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama Lengkap : Angelina Salsabila

NIM : 190604007

Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi

E-mail : 190604007@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi Yang berjudul:

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 30 Desember 2024

Mengetahui

Penulis

Angelina Salsabila
NIM. 19060404007

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, S.E., Msi., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II

Uliya Azra, S.E., M.Si
NIP. 199410022022032001

KATAPENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan berkat Rahmat, dan Karunia-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh”**. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kehidupan manusia lebih bermakna dan berilmupengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
2. Cut Dian Fitri, SE.,M.Si.,Ak., CA selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, dan Uliya Azra, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi
3. Hafiizh Maulana,SP.,SHI.,ME. selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

4. Cut Dian Fitri, SE.,M.Si.,Ak.,CA sebagai dosen pembimbing I,dan Uliya Azra, S.E., M.Si sebagai pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Hafiih Maulana,SP.,SHI.,ME. selaku penguji I dan Rachmi Meutia, M.Sc_selaku penguji II yang telah memberikan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Uliya Azra, S.E., M.Si Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada cinta pertamaku Ayahanda Kasman, beliau hanya seorang abdi negara yang lulus dengan pendidikan terakhirnya dibangku SMA, namun beliau mampu memberikan penulis kesempatan untuk menjunjung pendidikan yang lebih tinggi yakni dunia perkuliahan yang mampu penulis selesaikan. Terima kasih untuk cinta pertamaku yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan mengingatkan pentingnya belajar dan mengikhlaskan. Teruntuk pintu surgaku Ibunda Khalidah yang senantiasa mendoakan, mengingatkan untuk terus bersabar dan bersyukur sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga akhir. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk

pulang bu.

8. Teruntuk adik-adik tercinta M Radja Zawata Afnan dan Ratu Apriliya Khayyara yang telah mendoakan dan menghibur penulis. Terimakasih pula penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat terkhususnya Sunita Andriani, S.E., Mikial Bulkiah, Aan Okta Vianda, S.E., Chaula Salsabila, S.E., dan Fitriani, S.E., dimana telah memberikan dukungan besar serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada pemilik NIM 1922401014 terimakasih telah senantiasa mendengarkan segala keluh kesah, menyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja di tengah kekhawatiran yang melanda, menjadi saksi dari segala kendala dan air mata dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah berkontribusi banyak dan memilih tetap berada disamping penulis disaat dalam penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Ekonomi leting 2019 dan kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tetapi telah mendoakan dan memberikan motivasi untuk peneliti.
12. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Angelina Salsabila terima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di

titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Ilmu Ekonomi pada umumnya dan yang terkait hasil penelitian dalam penulisan Skripsi ini pada khususnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2024

Penulis,

Angelina Salsabila

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ث	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
.	<i>Fathah</i>	A
˘	<i>Kasrah</i>	I
˙	<i>Dammah</i>	U

b. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa: كيف

هول: haula:

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال: *qāla*
رمى: *ramā*
قيل: *qīla*
يقول: *yaqūlu*

4. Ta Marbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah(ة)hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah*(ة) mati
 Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talḥah:

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterai. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Angelina Salsabila
NIM : 190604007
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Belanja Modal di Provinsi Aceh
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si., AK., CA
Pembimbing II : Uliya Azra, S.E., M.Si

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Dalam konteks pembangunan daerah, pajak dan retribusi memiliki peran strategis dalam mendukung kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah seperti halnya belanja modal. Studi dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif menggunakan data sekunder dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di Provinsi Aceh selama periode 2013-2023. Model penelitian yang digunakan adalah model regresi data panel dengan model yang terpilih yaitu *Random Effect Model* yang diolah menggunakan *EViews 13*. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya, dari hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
KATAPENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
2.1 Belanja Modal.....	18
2.1.1 Pengertian Belanja modal.....	18
2.1.2 Ciri-ciri Belanja Modal	21
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal	22
2.2 Pajak	23
2.2.1 Pengertian Pajak.....	23

2.2.2 Teori Perpajakan	24
2.2.3 Fungsi Pajak	27
2.2.4 Pajak Daerah	28
2.2.5 Prinsip-prinsip Pajak Daerah.....	30
2.2.7 Jenis-Jenis Pajak Daerah	32
2.3 Retribusi Daerah.....	37
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	37
2.3.2 Ciri-ciri Retribusi Daerah.....	38
2.3.3 Jeni-Jenis Retribusi Daerah.....	39
2.3.4 Tarif Retribusi Daerah.....	49
2.4 Penelitian Terdahulu.....	51
2.5 Kerangka Berfikir	55
2.5.1 Hubungan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal ...	55
2.5.2 Hubungan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal	56
2.6 Hipotesis Penelitian	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Rancangan Penelitian	59
3.2 Sumber Data	59
3.3 Teknik Pengumpulan Data	60
3.4 Variabel Penelitian	61
3.4.1 Variabel Denpenden.....	61
3.4.2 Variabel Indenpenden	61
3.5 Definisi Operasional Variabel	61
3.6 Metode Analisis Data	62
3.7 Model Estimasi Regresi Data Panel	64
3.7.1 Tahapan Uji Panel.....	65
3.8 Pengujian Hipotesis	67

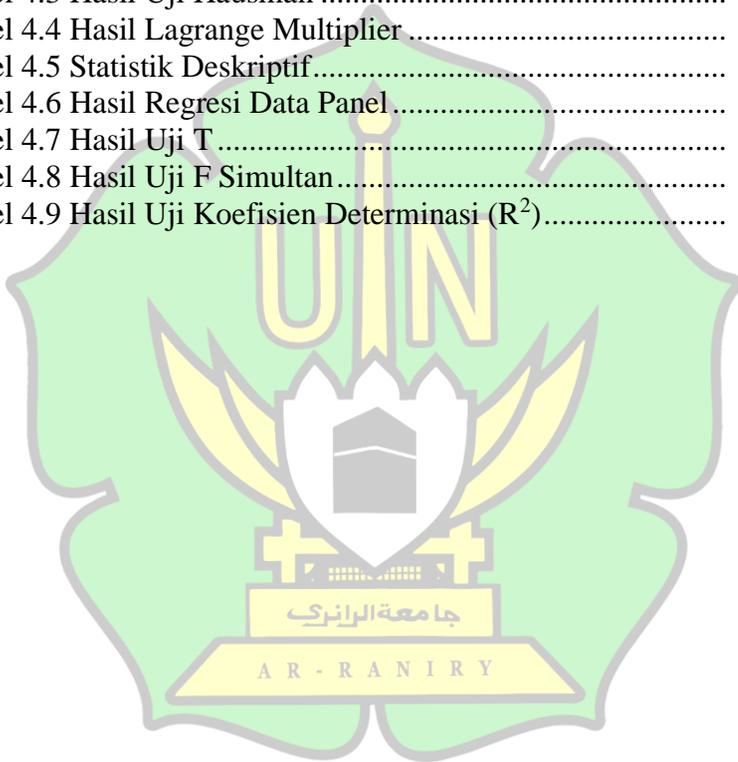
3.8.1 Uji Parsial (Uji t).....	67
3.8.2 Uji Simultan (Uji F)	68
3.9 Analisis Koefisien Determinasi (R²).....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Gambaran Umum Penelitian	69
4.2 Deskripsi Penelitian.....	69
4.3 Belanja Modal.....	70
4.4 Pajak Daerah.....	72
4.5 Retribusi Daerah.....	74
4.6 Analisis Penentuan Regresi Data Panel.....	76
4.7 Regresi Data Panel.....	81
4.7.1 Hasil Statistik Deskriptif	81
4.7.2 Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal	81
4.8 Uji Hipotesis	83
4.8.1 Uji Parsial (<i>T-Test</i>).....	83
4.8.2 Uji Simultan (Uji F)	84
4.8.3 Koefisien Determinasi (R²).....	85
4.9 Pembahasan	86
4.9.1 Pengaruh Pajak Daerah (X1) terhadap Belanja Modal (Y)	86
4.9.2 Pengaruh Retribusi Daerah (X2) terhadap Belanja Modal (Y).....	88
4.9.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal	89
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

LAMPIRAN	98
BIODATA	112



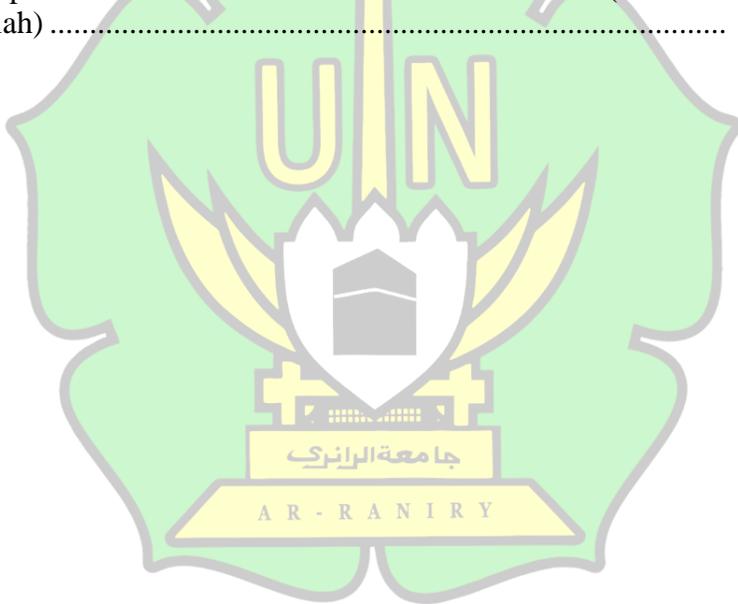
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Kabupaten dan Kota	36
Tabel 2.2 Perbedaan Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah	51
Tabel 2.3 Penelitian Terkait	42
Tabel 3.1 Operasional Variabel	62
Tabel 4.1 Hasil Regresi Data Panel	77
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow	78
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman	79
Tabel 4.4 Hasil Lagrange Multiplier	80
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif	81
Tabel 4.6 Hasil Regresi Data Panel	82
Tabel 4.7 Hasil Uji T	83
Tabel 4.8 Hasil Uji F Simultan	84
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2013-2023 (Miliar Rupiah).....	5
Gambar 1. 2 Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	8
Gambar 1.3 Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah	11
Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	55
Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	55
Gambar 4.1 Grafik Realisasi Rata-rata Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2013-2023	71
Gambar 4.2 Grafik Rata-Rata Realisasi Pajak Daerah	73
Gambar 4.3 Grafik Rata-Rata Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013-2023 (Miliar Rupiah)	75



DAFTAR SINGKATAN

BPKA	: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
PBB-P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PD	: Pajak Daerah
RD	: Retribusi Daerah
BM	: Belanja Modal



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Belanja Modal, pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Miliar Rupiah)	69
Lampiran 2 Rata-Rata data Belanja Modal, Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2013-2023 (Miliar Rupiah)	76
Lampiran 3 <i>Common effect</i>	77
Lampiran 4 <i>Fixed Effect</i>	78
Lampiran 5 <i>Random effect</i>	79
Lampiran 6 <i>Uji Chow</i>	80
Lampiran 7 <i>Uji Hausman</i>	80
Lampiran 8 <i>Uji Lagrange Multiplier</i>	81
Lampiran 9 Statistik Deskriptif.....	81

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara luas yang terbagi atas beberapa provinsi dan terpisah antar pulau-pulau, setiap provinsi di Indonesia terdiri atas daerah-daerah dan kabupaten/kota yang masing-masing memiliki pemerintah daerahnya. Tujuan dibentuknya pemerintah daerah di setiap wilayah Indonesia agar pemerintah pusat lebih mudah mengkoordinasi pemerintahan yang ada di setiap provinsi, kabupaten/kota, kecamatan serta desa-desa atau perkampungan. Agar dapat memudahkan penataan dan pelayanan pemerintah, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berasaskan sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan landasan yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua Undang-Undang dibidang

otonomi tersebut berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggara fungsi pemerintah daerah (Sipahutar et al., 2020). Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses penyerahan kewenangan fiskal atau keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, yang sebelumnya harus diputuskan oleh pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat (Trisnawati, 2021).

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki wewenang untuk mengalokasikan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pembelanjaan daerah tidak terlepas dari pendapatan daerah yang diterima. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dari komponen belanja langsung yang sifatnya menambah investasi atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi), dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Pemanfaatan aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh publik berupa infrastruktur, pelayanan dan fasilitas publik seperti jalan raya, jembatan, lampu penerangan jalan, trotoar, stadion, rambu lalu lintas, sedangkan fasilitas yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh atau tidak berhubungan langsung dengan publik seperti gedung pemerintahan. (Waluyo, 2018). Belanja modal dibagi

menjadi: Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas (Halim, 2014).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana pembangunan dalam bentuk Belanja Modal yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Dengan semakin meningkatnya Belanja Modal di suatu daerah akan berakibat menambah aset tetap di suatu daerah dan akan terus meningkatkan produktivitas masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan Belanja Modal dengan baik karena Belanja Modal merupakan salah satu bentuk perwujudan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian Belanja Modal, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari PAD juga Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari dana perimbangan(Putri, 2021).

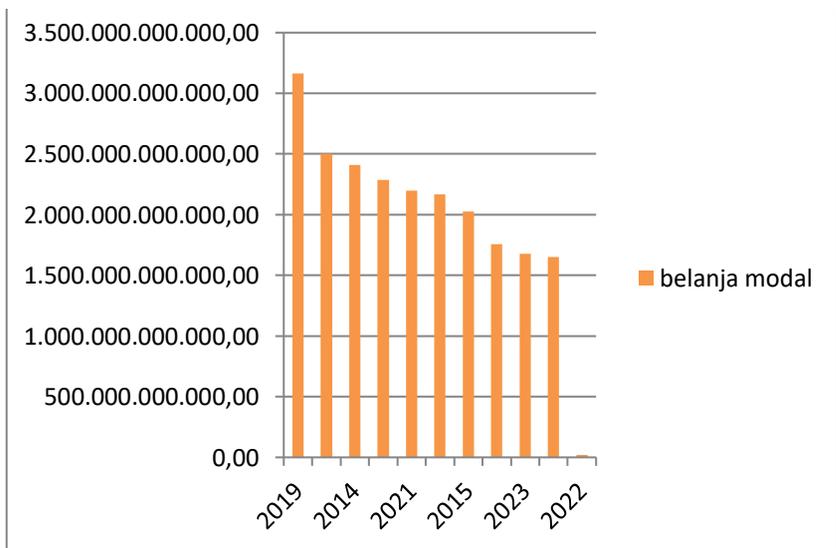
Permasalahan belanja modal sampai saat ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Aceh, baik di pusat maupun di daerah. Selama tahun 2013-2023 kontribusi belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Aceh hanya mencapai 15 – 18 persen, berada jauh dibawah kontribusi belanja operasi. Padahal belanja modal merupakan realisasi anggaran yang berakibat bertambahnya asset bagi pemerintah Provinsi Aceh seperti jalan, gedung, irigasi dan sebagainya. Sehingga kedepan hendaknya lebih intensif diperhatikan dan diprioritaskan. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan di daerah belum terlihat berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan masih minimnya kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka diperlukan pendapatan yang dipungut dari masyarakat oleh pemerintah daerah baik yang bersumber dari kontribusi wajib maupun tidak. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak dan retribusi daerah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat (Statistik Keuangan Aceh 2022).

Belanja Modal (*capital expenditures*) digunakan untuk sumber keuangan dalam membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur dengan nilai yang relatif besar dan memiliki masa manfaat yang panjang. Priambudi (2016) menyebutkan konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) yang menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget*

capability) dalam pengelolaan aset untuk jangka panjang. Dalam hal ini pengadaan sarana dan prasarana yang termasuk dalam kategori Belanja Modal haruslah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang atau rencana pembangunan jangka menengah masing-masing daerah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi 12 (dua belas) bulan serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

Gambar 1.1 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2013-2023 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKA Provinsi Aceh

Berdasarkan gambar 1.1. di atas, realisasi belanja modal pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2013 hingga 2023 mengalami fluktuasi untuk setiap tahunnya. Realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2019 dan realisasi terendah terdapat pada tahun 2022. Realisasi keseluruhan belanja modal Provinsi Aceh mengalami turun naik setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan lebih aktif dan terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan mendistribusikan dana pada semua kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian. Setiap kota atau kabupaten didorong untuk dapat memaksimalkan potensi ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan perekonomian.

Untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka diperlukan pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat baik kontribusi wajib maupun tidak. Pendapatan tersebut di antaranya adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbedabeda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat begitupun dengan retribusi daerah. Salah satu yang memengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah. PAD membantu pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun komponen PAD tersebut yaitu terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah pusat juga memberikan pendapatan transfer kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan. PAD yang memiliki

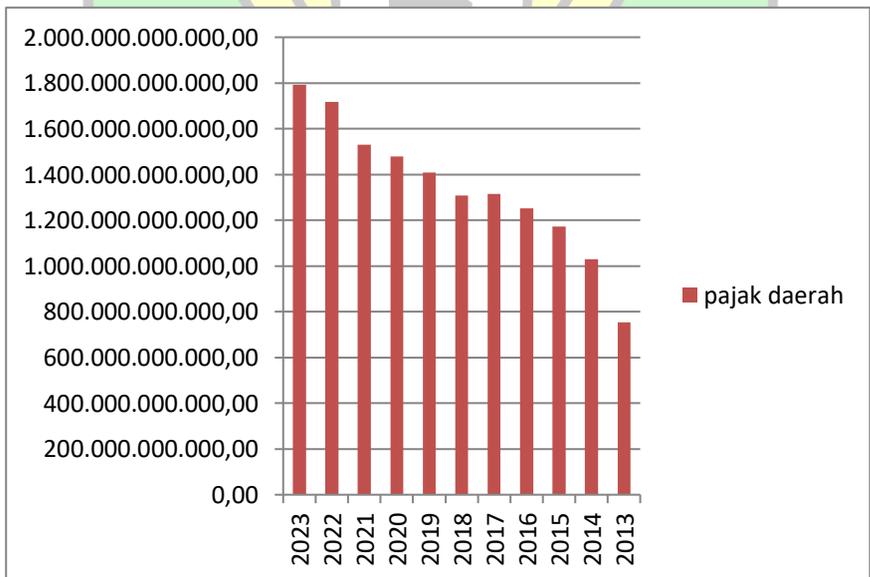
kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah adalah pajak daerah karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah (Rotinsulu, 2016).

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 Pajak Daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk menjadikan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah menjadi lebih baik maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni salah satunya dengan upaya peningkatan penerimaan PAD yaitu dengan meningkatkan penerimaan sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut (sintia, 2019).

Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain. Pajak merupakan suatu sistem perpajakan indonesia yang perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil karena pada dasarnya merupakan beban masyarakat. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan

pajak nasional. Pembinaan tersebut dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek, tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. Pendapatan Pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat dominan dengan nilai Rp 1.791.227 miliar, jauh lebih besar dibandingkan retribusi daerah yang hanya Rp 16.462.009 miliar. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah menjadi tulang punggung utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh. Efektivitas Sumber Pendapatan Pajak daerah terbukti lebih efektif sebagai sumber pendapatan karena sifatnya yang wajib dan memaksa, sementara retribusi daerah yang bersifat sukarela dan berbasis penggunaan jasa menghasilkan pendapatan yang lebih kecil

Gambar 1. 2 Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2013-2023 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKA Provinsi Aceh

Berdasarkan gambar 1.2 penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami adanya perubahan pada tahun 2013-2023 terjadi adanya peningkatan signifikan dari Rp 752,85 miliar menjadi Rp 1.791,23 miliar Rata-rata pertumbuhan tahunan yang positif menunjukkan pengelolaan pajak daerah yang semakin baik.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Pendapatan dari pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran dapat digunakan untuk membiayai belanja modal. Belanja modal ini mencakup investasi dalam infrastruktur, pembangunan fasilitas publik, dan pengadaan aset tetap yang akan meningkatkan kapasitas dan pelayanan pemerintah daerah. Pajak Daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah yang dapat menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan daerah (Rahajeng, 2021).

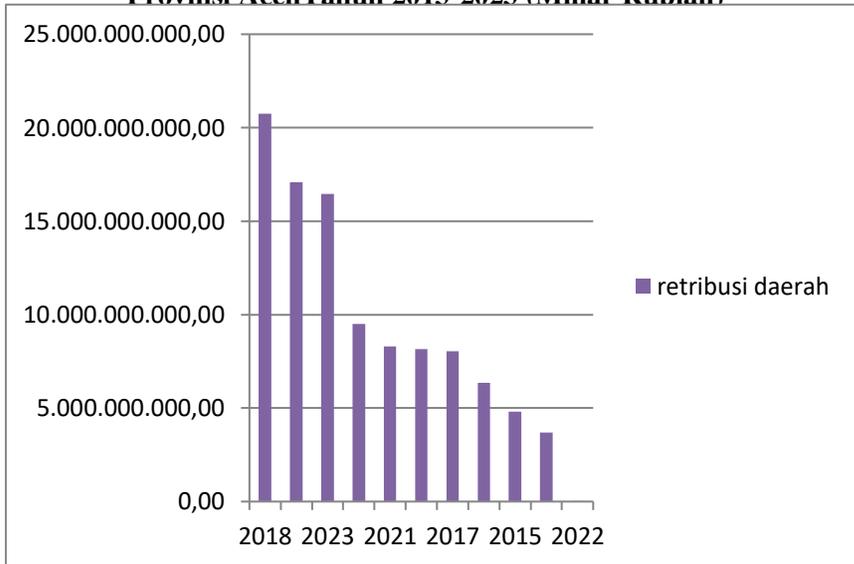
Dalam penelitian Rahajeng et al.,(2021), menunjukkan adanya keterkaitan pajak daerah dengan belanja modal. Pajak daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah yang tertuang dalam belanja modal menggambarkan suatu kemandirian daerah dan kontribusi besar dalam memberikan pendapatan daerah. Pajak daerah adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendanaan utama untuk pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan

pendapatan negara, hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil, sebagai contoh untuk pajak bumi dan bangunan, pasti wajib pajak yang bersangkutan setiap tahunnya dibebankan pajak bumi dan bangunan untuk setiap aset yang dimiliki. Selain itu, pajak daerah pembayarannya wajib dan memaksa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan membuat masyarakat sadar dan peduli untuk melaksanakan kewajiban kenegaraannya.

Penambahan Pendapatan Asli Daerah yang lain seperti, retribusi daerah juga tidak kalah penting. Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan tertentu yang diberikan secara langsung, adapun alasan atas putusan retribusi suatu pelayanan adalah adanya barang privat, yaitu sesuatu barang atau jasa yang tidak semua orang dapat memilikinya atau menikmati manfaatnya, melainkan seseorang tersebut harus memembayarnya terlebih dahulu. Sedangkan alasan yang lain karena adanya barang publik, yaitu barang dapat dimiliki atau dinikmati oleh semua orang yang tidak dibatasi penggunaannya (Febriani, 2021).

Undang-undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa: Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Gambar 1.3 Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2013-2023 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPKA Provinsi Aceh

Berdasarkan gambar 1.3 Tentang Realisasi retribusi daerah bahwasannya realisasi penerimaan terbanyak pada tahun 2013-2018 terlihat terjadi adanya fluktuatif dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp 20,76 miliar dan terendah pada tahun 2022 sebesar Rp 16,53R juta, namun kemudian mengalami pemulihan signifikan di tahun 2023 menjadi Rp 16,46 miliar. Periode pertumbuhan positif terjadi dari tahun 2013-2018, dimana retribusi meningkat dari Rp 6,34 miliar menjadi Rp 20,76 miliar, sebelum mengalami penurunan bertahap dari 2019-2022 yang dipengaruhi oleh dampak pandemi dan pembatasan aktivitas. Pemulihan drastis di tahun 2023 menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan pelayanan publik,

namun juga mengindikasikan bahwa retribusi sangat sensitif terhadap kondisi eksternal, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih adaptif, diversifikasi sumber retribusi, dan peningkatan kualitas layanan publik untuk menjaga stabilitas pendapatan retribusi di masa mendatang.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran oleh masyarakat atau entitas swasta untuk mendapatkan layanan atau fasilitas tertentu (seperti parkir, izin usaha, atau pemanfaatan sumber daya), merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai belanja modal, yaitu investasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik. Peningkatan mutu dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah dari retribusi juga memadai. Pemerintah disini sebagai agen akan melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan prinsipal yaitu masyarakat yang membayar dana sesuai dengan perizinan yang diajukan masyarakat atau badan tersebut. Menjadi bagian dari PAD, retribusi daerah dianggap dapat meningkatkan Belanja Modal daerah karena komponen peningkatan Belanja Modal sendiri salah satunya berasal dari PAD (Trisnawati 2021).

Besarnya PAD memungkinkan suatu daerah dapat memenuhi segala kebutuhan belanjanya sendiri tanpa tergantung dengan pemerintah pusat salah satunya adalah belanja modal. Jumlah PAD yang didapat Pemda juga dapat menjadikan ukuran kemandirian

daerah itu sendiri sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, hal itu dapat diukur dengan penerimaan dari retribusi daerah yang nantinya menyebabkan meningkatnya pelayanan kepada publik (Isthika, 2022). Dalam penelitian Harori, (2022) menjelaskan bahwasannya retribusi daerah berbeda hal nya dengan pajak daerah. Dikarenakan titik tekan pada retribusi daerah adalah adanya imbalan secara langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak dijumpai keluhan masyarakat atas pelayanan retribusi daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Masih adanya ketidakcocokan antara retribusi yang dibayar dengan kualitas pelayanan yang diterima, oleh karena itu masyarakat tidak mau membayar lebih tinggi apabila pelayanan yang diterima kualitasnya masih buruk. Selain itu, hal tersebut juga akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah, sehingga akan mengakibatkan masyarakat enggan untuk menggunakan jasa pelayanan retribusi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah masing-masing untuk menambah pendapatan asli daerah termasuk mengoptimalkan hasil retribusi daerah sehingga dapat berdampak baik terhadap belanja modal. Rendahnya sumber pembiayaan pemerintah dalam pembangunan daerah menyebabkan anggaran belanja modal menurun.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan adanya perbedaan dalam hasil penelitian, tetapi menunjukkan bahwasannya pajak daerah dan retribusi daerah

memiliki potensi untuk mempengaruhi belanja modal, baik secara individu maupun simultan, dengan konteks dan penyelenggaraan yang tepat. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, dengan objek ataupun lokasi yang berbeda yaitu di Provinsi Aceh. Maka dari uraian pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi masalah penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh?
2. Bagaimana Pengaruh retribusi daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh?
3. Bagaimana Pengaruh pajak daerah dan Retribusi terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti ini, yaitu:

1. Manfaat Teoristis

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi daya guna terhadap pengembangan ilmu baik di bidangnya maupun bidang terkait lainnya, serta dapat menambah wawasan untuk peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Sehingga dapat menjadi referensi baru untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi contoh penelitian selanjutnya dengan menggunakan objek yang berbeda.

2. Manfaat praktis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dalam mempertanggungjawabkan belanja modal dengan memperhatikan dan mempertimbangkan variabel sesuai dengan judul penelitian ini yaitu pajak daerah daerah dan retribusi daerah.

3. Manfaat Kebijakan

Untuk meningkatkan dan memberi masukan terhadap pemerintah daerah Provinsi Aceh dalam melakukan dan menyusun strategi untuk pengembangan dalam bidang yang bersangkutan dengan penelitian ini. Selain itu adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pemerintah daerah Provinsi Aceh, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting sebagai indikator dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan pendahuluan yang berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan juga sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini memuat uraian mengenai landasan teori yang berkaitandengan tema skripsi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Penelitian ini berhubungandengan antar variabel, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menerangkan secara jelas dan rinci metode penelitian yangdigunakan oleh peneliti berserta justifikasinya,

jenis penelitian, lokasi, jenis data, metode pengumpulan data, serta analisis penelitian yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat tentang hasil penelitian, klasifikasi pembahasan sesuai pendekatan, sifat penelitian, dan rumus masalah atau fokus penelitian.

BAB V Penutup

Bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu sendiri menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sedangkan saran merupakan rumusan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

